
BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDIRIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH AR-RAHMAN DI DESA WIDODAREN KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI

Oleh

Nur Hidayah¹, Abdur Rahim²

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Tarbyah,
Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu

Email: ¹hidayah3060@gmail.com, ²rahim@iai-alzaytun.ac.id

Article History:

Received: 05-06-2022

Revised: 05-06-2022

Accepted: 20-07-2022

Keywords: Form,
Participation, Community,
Madrasah

Abstract: *That in the context of developing national education, the active participation of the entire community is required. The forms of participation that have developed so far are very varied, depending on the situation and conditions of each region. In addition to the participation of the entire community, it is absolutely necessary for government policies to always support the direction of increasing the number and quality of educational institutions at all levels, including Islamic religious education. This study aims to determine the form of community participation and government policies in establishing/developing Madrasah Ibtidaiyah Ar-Rahman in Widodaren Village, Widodaren District, Ngawi Regency. The subjects of the research were the staff of the Ministry of Religion of Ngawi Regency, the Chairperson of the Ar-Rahman Widodaren Foundation, the Head of the Ibtidaiyah Madrasah Ar-Rahman Widodaren, a number of parents of students and members of the community around MI Ar-Rahman Widodaren. This type of research is descriptive qualitative with data collection techniques: interviews, observation, and documentation. Data analysis using a single site; and checking the validity of the data using triangulation techniques and confirmability criteria. The results of the study show that: (1) the form of community participation in the development of MI Ar-Rahman Widodaren, in physical form including waqf land from residents, money, materials, teak wood, building power, consumption, benches, and shuttle car facilities, and school library books. Non-physical forms of community participation include ideas or contributions from community leaders, religious leaders, and other non-formal figures; and (2) government policies in the development of MI Ar-*

Rahman Widodaren in the form of administrative and non-administrative assistance, including planning, implementing, and evaluating the development program of MI Ar-Rahman Widodaren, including funding for School Operational Fees (BOS) and state teachers. which is still ongoing today.

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat merupakan peran serta atau keikutsertaan dan keterlibatan seseorang secara perseorangan atau berkelompok dalam suatu kegiatan. Conyer (1984) menjelaskan bahwa pendekatan dalam partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan.

Sebagaimana inti dari hubungan masyarakat di mana seorang manajer atau kepala sekolah dengan keterampilan menejerialnya harus mengkomunikasikan seluruh informasi terkait dengan lembaganya kepada masyarakat dan bagaimana cara memperoleh dukungan masyarakat dalam pelaksanaan proses pendidikan di lembaganya. (Siti Samroh, 2017: 18). Dengan adanya sosialisasi dari pihak yayasan dan pihak madrasah kepada masyarakat sudah merupakan pengamalan dari firman Allah tersebut. Mengajak masyarakat untuk bergotong royong dalam mendirikan sarana dan prasarana pendidikan yang Islami. Akan tetapi fenomena yang terjadi bahwa banyak lembaga pendidikan yang memiliki keadaan kurang stabil yang sering diistilahkan dengan *laa yamuutu wa laa yahya* atau hidup segan matipun tak mau, ini dikarenakan kurangnya hubungan sosial dengan masyarakat yang menjadi sumber dukungan lembaga tersebut, seringkali suatu lembaga pendidikan masih mengabaikan untuk kerjasama dengan masyarakat dalam pengembangan dan proses pendidikan.

Kehadiran madrasah di Indonesia merupakan simbiosis mutualistik antara masyarakat dan madrasah itu sendiri. Madrasah merupakan salah satu organisasi yang tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat berkembang dan mencapai kemajuan tanpa keterlibatan dari lingkungan masyarakatnya. (Siti Samroh, 2017: 18)

Seperti madrasah-madrasah yang bisa kita lihat saat ini banyak yang masih belum memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh siswa. Hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah siswa yang masuk setiap tahun ajaran baru dikarenakan fasilitas yang terdapat di madrasah itu masih belum memadai, madrasah juga perlu memberi informasi kepada masyarakat tentang program-program dan masalah yang dihadapi sehingga masyarakat dapat mengetahuinya. Sehingga nanti diharapkan adanya umpan balik yang sangat berguna bagi pengembangan program madrasah lebih lanjut dan diharapkan pula tumbuhnya rasa simpati masyarakat terhadap program-program madrasah, yang dapat mengundang partisipasi yang aktif masyarakat. Dalam perjalanan menuju madrasah yang unggul baik pihak madrasah maupun masyarakat harus saling bekerja sama. Salah satu upaya agar kinerja madrasah dapat berjalan dengan efektif adalah dengan menggandeng masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan dan pengembangan madrasah Siti Samroh, 2017: 19).

Secara historis kehadiran dan perkembangan madrasah, merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari, oleh dan untuk masyarakat. (Tilaar, 2000: 169) Ini berarti bahwa lembaga pendidikan yang berasal dari masyarakat seharusnya memberikan kontribusi bagi

pemenuhan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraannya, sehingga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peranan dalam setiap tahapan program pendidikan yang diselenggarakan.

Bukan sekedar mengharapkan uluran tangan dari pemerintah, oleh karena itu sistem penyelenggaraan harus percaya pada kemampuan masyarakat untuk bertanggungjawab kepada pendidikan generasi mudanya. (Tilaar, 1999: 169) Adanya kecenderungan untuk melakukan transformasi budaya dan nilai agama Islam kepada generasi berikutnya, merupakan konsep pemikiran masyarakat muslim untuk membenahi lembaga pendidikannya. Pendidikan yang diprakarsai dan diselenggarakan oleh masyarakat, bukan berarti melepaskan tanggung jawab pemerintah. Tugas pemerintah di dalam pendidikan nasional adalah memelihara dan mengarahkan agar supaya tanggung jawab masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya (Siti Samroh, 2017; 20).

Pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan masyarakat diartikan bahwa masyarakat diikutsertakan dalam program-program kependidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah, tentu hal ini searah dengan kecenderungan masyarakat karena madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memiliki visi, misi dan karakteristik yang khas dilihat dari segi sosial budaya, politik, bahkan ekonomi.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Depdiknas RI) bahwa salah satu konsekuensi dalam penyelenggaraan pendidikan yang berbasis masyarakat adalah menanti keterlibatan masyarakat secara keseluruhan yaitu, orang tua siswa, masyarakat sekitar sekolah, pengusaha, organisasi sosial kemasyarakatan dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah/madrasah sebagai salah satu unit pelaksana pendidikan harus dapat menjalin kerja sama yang baik dari segi pemikiran, tenaga, pembiayaan, serta pemecahan masalah yang dihadapi madrasah dengan masyarakat (Depdiknas RI, 2003: 4).

Komitmen untuk menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan sudah cukup jelas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab XV Pasal 54 ayat (1) bahwa "Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan" (UURI, 2003: 20).

Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih bersifat pada dana sedangkan dalam pengambilan keputusan, gagasan maupun tenaga masih terbatas. Masyarakat diharapkan dapat memberikan ide dan gagasan yang membangun dalam pendidikan di madrasah demi majunya sebuah pendidikan. Peningkatan partisipasi adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis dimana warga sekolah dan masyarakat didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan dimulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Hal tersebut dilandasi keyakinan bahwa jika seorang dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan, yang bersangkutan akan mempunyai rasa memiliki terhadap madrasah sehingga akan bertanggung jawab dan dedikasi mereka untuk madrasah. Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah akan menciptakan keterbukaan dan kerja sama yang kuat.

Purwanto sebagaimana dikutip Minarti (2011), mengatakan hubungan kerja antara sekolah dan masyarakat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Hubungan Edukatif, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat dalam hal mendidik siswa, antara guru di sekolah dan orang tua dalam keluarga. Kerjasama tersebut dapat direalisasikan dengan mengadakan pertemuan yang direncanakan secara periodik antara guru-guru di sekolah dan orang tua peserta didik sebagai anggota komite sekolah, disamping itu juga dapat dilakukan dengan anjangan oleh guru-guru ke rumah orang tua peserta didik di luar waktu sekolah, (2) Hubungan Kultural, yaitu kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat di tempat sekolah itu berada. Untuk mewujudkan hubungan kerjasama ini yaitu dengan sekolah harus mengarahkan peserta didik untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial yang diperlukan oleh masyarakat dengan bergotong-royong dalam memperbaiki fasilitas umum seperti memperbaiki jalan, membersihkan lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan dan juga bersama-sama menyelenggarakan perayaan yang bersifat keagamaan ataupun nasional dengan mementaskan berbagai kesenian dan pertunjukkan. (3) Hubungan Institusional, yaitu hubungan kerja sama antara sekolah dan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lainnya, baik swasta maupun pemerintah. Misalnya hubungan sekolah dengan Puskesmas, pemerintah setempat, dinas pertanian, pasar dan sebagainya. (Minarti, 2011: 278-280).

Hubungan masyarakat sebagai mediator komunikasi dua arah antara madrasah dan masyarakat yaitu sekolah menyampaikan informasi-informasi secara terbuka tentang suasana atau kondisi madrasah dan masyarakat harus memberikan tanggapan, kritikan, masukan serta menyumbangkan ide-ide untuk mendukung kemajuan lembaga tersebut. Oleh karena itu, hubungan masyarakat dengan pihak madrasah dan lembaga harus lebih erat lagi agar bisa menjalankan fungsinya untuk mengembangkan program lembaganya.

Dengan demikian madrasah harus bisa menjadi mercusuar penerang bagi masyarakat. Sebagai mercusuar penerang, madrasah harus mampu memberikan tauladan cara hidup yang benar kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi berdaya. Pada saat yang sama madrasah harus menampung semua aspirasi dan kondisi masyarakat lokal dengan membuat program pendidikan yang sesuai dengan masyarakat. Jadi dalam hal ini lembaga atau yayasan beserta pihak madrasah bersama-sama untuk mengajak masyarakat sekitar dalam mencerdaskan anak bangsa dengan mendirikan tempat kegiatan belajar yang berpondasikan agama Islam.

Pendirian madrasah pada awalnya dibantu oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada tahun 2011 dan selebihnya atas swadaya masyarakat desa Widodaren kecamatan Widodaren kabupaten Ngawi. Partisipasi masyarakat dalam berbagai macam bentuknya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pendirian atau pembangunan madrasah tersebut.

Namun masih belum semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam mendirikan madrasah tersebut dikarenakan ada beberapa kendala. Sehingga kondisi MI Ar-Rahman Widodaren tersebut belum mempunyai fasilitas yang dibutuhkan oleh siswa. Misalnya, perpustakaan belum ada, alat peraga untuk pembelajaran belum ada, alat-alat olah raga juga belum ada dan mobil antar jemput siswa masih menggunakan mobil dari salah satu tokoh masyarakat yang kondisinya mobil lama yang terkadang rusak.

Kondisi MI Ar-Rahman Widodaren yang tersebut diatas sangat memerlukan adanya

partisipasi masyarakat yang lebih meningkat. Melihat pentingnya partisipasi dari masyarakat dalam mendirikan MI Ar-Rahman Widodaren tersebut penulis ingin mendeskripsikan dan menganalisis serta mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam mendirikan madrasah ibtidaiyah Ar-Rahman di desa Widodaren kecamatan Widodaren kabupaten Ngawi, maka penelitian ini diberi judul "Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Ar-Rahman Di Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi".

LANDASAN TEORI

1. Partisipasi

Partisipasi berasal dari Bahasa Latin *participare* yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia mengambil bagian atau turut serta. Tilaar (2009), mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya (Tilaar, 2009: 287).

Menurut Miarso (2004) istilah partisipasi adalah keterlibatan secara spontan baik berupa pikiran, tenaga, barang ataupun uang yang disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan (Miarso, 2004: 706). Suryosubroto (2001) mengutip pendapat Davis bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan pikiran individu di dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan tujuan kelompok tersebut (Suryosubroto, 2001: 75).

Dari beberapa pendapat di atas bisa penulis simpulkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi itu bisa berupa gagasan, kritik membangun, dukungan, dan pelaksanaan pendidikan (Mulyasa, 2006: 167); oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan, karena sekolah merupakan *partner* orang tua siswa dalam mengantarkan cita-cita dan membentuk pribadi peserta didik sebagai agen perubahan.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007: 27).

Menurut pendapat Mubyarto (1984) partisipasi masyarakat sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri (Mubyarto, 1984: 35).

Menurut Astuti (2011) partisipasi masyarakat merupakan hak sebagai warga negara yang hidup dalam sistem demokratis dan kita harus menyadari bahwa partisipasi itu merupakan hak setiap warga masyarakat (Astuti, 2011: 50).

Partisipasi masyarakat sering sebagai sumbangan tenaga, uang atau barang dalam rangka menyukseskan program atau proyek pembangunan. Dengan perkataan lain partisipasi masyarakat diartikan seberapa besar tenaga, dana, atau barang yang dapat disediakan sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah (Suryasubroto, 2001: 74).

Menurut penulis berdasarkan beberapa pengertian di atas, partisipasi masyarakat

itu merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah ataupun lembaga tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada peran serta dari masyarakat sekitar yang berada dimana sekolah itu didirikan.

3. Tipe Partisipasi Masyarakat

Sekretariat Bina Desa (1999: 32-34), mengidentifikasikan partisipasi masyarakat menjadi tujuh tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu:

a. Partisipasi Pasif/manipulatif

Masyarakat berpartisipasi dengan cara diberi tahu apa yang sedang atau yang telah terjadi, pengumuman sepihak atau manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat.

b. Partisipasi dengan cara memberitahu informasi

Masyarakat berpartisipasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya.

c. Partisipasi melalui konsultasi

Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi; orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri dan untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya.

d. Partisipasi untuk insentif materiil

Masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja demi mendapatkan upah, makanan, ganti rugi, dan sebagainya.

e. Partisipasi Fungsional

Masyarakat berpartisipasi dengan cara membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek.

f. Partisipasi Interaktif

Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah kepada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada.

g. *Self Mobilization*

Masyarakat berpartisipasi dengan cara mengambil inisiatif secara bebas (tidak ditekan/dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengembangkan sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pendidikan

Berawal dari penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, yaitu: pemerintah, orang tua dan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa orang tua murid dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk berpartisipasi, turut memikirkan dan memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah, partisipasi yang tinggi dari orang tua murid dan masyarakat dalam pendidikan di sekolah merupakan salah satu ciri dari pengelolaan sekolah yang baik, artinya sejauh mana masyarakat diberdayakan dalam proses pendidikan di sekolah adalah indikator terhadap manajemen sekolah yang bersangkutan.

Menurut White dalam Sastropoetro (1988), ada 10 alasan pentingnya partisipasi masyarakat, yaitu:

a. Dengan berpartisipasi lebih banyak hasil kerja yang dapat dicapai.

b. Dengan partisipasi pelayanan atau service dapat diberikan dengan biaya murah.

- c. Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena menyangkut kepada harga diri.
- d. Partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya.
- e. Partisipasi mendorong timbulnya rasa tanggung jawab.
- f. Partisipasi menjamin, bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat telah dilibatkan.
- g. Partisipasi menjamin bahwa pekerjaan dilakukan dengan arah yang benar.
- h. Partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga terjadi perpaduan beberapa keahlian.
- i. Partisipasi membebaskan orang dari ketergantungan kepada keahlian orang lain.
- j. Partisipasi lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab kemiskinan, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap usaha untuk mengatasinya.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ditujukan untuk:

- a. Terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan.
- b. Terselenggaranya kerja sama yang menguntungkan antara pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.
- c. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya buatan seperti dana, fasilitas dan peraturan-peraturan.
- d. Meningkatkan kinerja sekolah, yang berarti pula meningkatnya produktivitas, kesempatan memperoleh pendidikan, keserasian proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kondisi anak didik dengan lingkungan, serta komitmen dari para pelaksana pendidikan (Miarso, 2004: 709).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang secara sadar untuk berkontribusi dalam menyumbangkan dana, gagasan, membantu tenaga, memberikan kritik yang membangun, memberikan motivasi, menyumbangkan keahlian serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan.

Berikut adalah beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam pendidikan:

- a. Mengawasi perkembangan pribadi dan proses belajar putra-putrinya di rumah dan perlu memberi laporan atau berkonsultasi kepada lembaga pendidikan.
- b. Menyediakan fasilitas belajar di rumah dan membimbing putranya agar giat belajar.
- c. Menyediakan perlengkapan belajar yang dibutuhkan untuk belajar di lembaga pendidikan.
- d. Berusaha melunasi SPP dan dana bantuan pendidikan lainnya.
- e. Memberikan umpan balik kepada lembaga pendidikan tentang pendidikan, tentunya yang menyangkut keadaan putra-putrinya.
- f. Bersedia datang ke lembaga pendidikan bila di undang.
- g. Ikut berdiskusi memecahkan masalah-masalah pendidikan seperti keuangan, sarana, kegiatan dan sebagainya.
- h. Membentuk fasilitas-fasilitas belajar yang dibutuhkan lembaga pendidikan dalam memajukan proses belajar mengajar (Wahjosumijo, 2010: 335).
- i. Meminjami perlengkapan pertukangan, perkebunan, Kesenian dan sebagainya yang dibutuhkan lembaga.
- j. Bersedia menjadi pelatih dan narasumber bila dibutuhkan.

- k. Menerima para siswa dengan senang hati bila mereka belajar di masyarakat.
- l. Memberi layanan atau penjelasan kepada para pelajar (siswa) yang belajar di masyarakat.
- m. Menjadi responden yang baik terhadap penelitian-penelitian siswa dan lembaga.
- n. Memberi bantuan penginapan bagi para siswa atau mahasiswa yang praktik di masyarakat.
- o. Bagi ahli pendidikan, bersedia menjadi eksper dalam membina lembaga pendidikan.
- p. Bagi hartawan bersedia membantu dana secara cuma-cuma.
- q. Ikut memperlancar komunikasi pendidikan di masyarakat dalam bentuk-bentuk penerbitan-penerbitan, siaran-siaran radio, televisi, pertunjukan dan sebagainya.
- r. Mengajukan usul-usul untuk perbaikan pendidikan.
- s. Ikut mengontrol jalannya pendidikan.
- t. Bagi tokoh-tokoh masyarakat bersedia menjadi partner manajer pendidikan dalam mempertahankan dan memajukan lembaga.
- u. Ikut memikirkan dan merealisasikan kesejahteraan personalia pendidikan (Pidarta, 1998: 199-200).

Menurut Mulyasa (2011), tujuan sekolah memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat antara lain:

- a. Demi kepentingan sekolah. Berdasarkan dimensi kepentingan sekolah, hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup sekolah, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, memperlancar kegiatan belajar mengajar, dan memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program-program sekolah.
- b. Kebutuhan Masyarakat. Berdasarkan dimensi kebutuhan masyarakat, tujuan pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperoleh kemajuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang terampil dan makin meningkat kemampuannya. (Mulyasa, 2011: 148)

5. Bentuk partisipasi masyarakat secara umum

Menurut Ericson dalam Slamet (1993) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat di dalam tahap perencanaan (idea planing stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan aktif dalam mengikuti rapat warga dan juga ikut memberikan usulan, saran dan kritik pada rapat tersebut.
- b. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan (implementation stage), partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan proyek. Masyarakat di sini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.

- c. Partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage), partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Menurut rumusan Direktorat Jenderal Pengembangan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri yang dikutip oleh Sudriamunawar (2006) yang menjadi bentuk partisipasi yang diperinci dalam jenis-jenis partisipasi adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi Buah Pikiran
- b. Partisipasi Tenaga dan Fisik
- c. Partisipasi Ketrampilan dan Kemahiran
- d. Partisipasi Harta Benda

Menurut pendapat Davis dalam Sastropoetro (1988) bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah berupa:

- a. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.
 - b. Sumbangan secara spontan biasanya berupa uang dan barang.
 - c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berada di luar lingkungan tertentu (pihak ketiga).
 - d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh masyarakat.
 - e. Sumbangan dalam bentuk kerja.
 - f. Aksi massa.
 - g. Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga desa mandiri, dan
 - h. Membangun proyek komuniti yang bersifat otonom.
6. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan

Untuk mengikutsertakan warga masyarakat dalam pembangunan pendidikan, sudah sewajarnya manajer pendidikan melalui tokoh-tokoh masyarakat aktif menggugah perhatian mereka. Para manajer dapat mengundang para tokoh masyarakat untuk membahas bentuk-bentuk kerjasama dalam pendidikan. Bidang kerjasama antara sekolah dan masyarakat dibagi menjadi dua yaitu: bidang kerja sama dengan orang tua dan bidang kerja sama dengan masyarakat

- a. Bidang kerja sama sekolah dengan orang tua siswa.

1) Bidang pengajaran

Kerja sama dalam bidang ini, dimaksudkan untuk memberikan bantuan dan kemudahan belajar kepada peserta didik, misalnya dalam mengerjakan pekerjaan rumah, orang tua harus membantu menjelaskan hal-hal yang belum diketahui peserta didik. Jika saja belum mengerti tugas yang dibebankan kepada anaknya orang tua harus bertanya kepada guru sehingga orang tua dapat membantu kelancaran belajar anaknya (Mulyasa, 2003: 101).

2) Bidang pengembangan bakat

Peserta didik mungkin mempunyai bakat tertentu, semisal bakat seni, musik, teknik, dan sastra. Bakat tersebut perlu segera diketahui sehingga melalui bidang studi yang sesuai dengan bakat peserta didik, guru dan orang tua siswa dapat bersama-sama membina dan mengembangkan bakat peserta didik tersebut (Mulyasa, 2003: 101)

3) Bidang pendidikan mental

Peserta didik sering mengalami kesulitan belajar, penyebabnya bermacam-macam, misalnya kedua orang tuanya broken home, situasi yang kurang kondusif tersebut sangat mempengaruhi mental peserta didik di sekolah, menjadi pemurung atau frustrasi (Mulyasa, 2003: 102).

4) Bidang kebudayaan

Bidang ini adalah sejauh mana anak menguasai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sekolah peserta didik diberikan pelajaran Bahasa Indonesia yang baik, tetapi kalau di rumah iklimnya tidak mendukung, perkembangan bahasanya akan jelek. Oleh sebab itu, orang tua harus berusaha berbahasa Indonesia yang baik dan benar agar situasi rumah dan sekolah serasi. Begitu pula dengan pembinaan kebersihan dan keindahan, hendaknya diusahakan agar siswa tampil serasi, berpakaian, tidak harus mahal, tetapi yang penting bersih. Kerja sama dalam bidang kebudayaan ini perlu lebih ditekankan pada penanaman rasa cinta terhadap budaya bangsanya (Mulyasa, 2003: 102-103).

b. Bidang kerja sama sekolah dengan masyarakat luas

1) Bidang pendidikan olah raga

Kerja sama dalam bidang pendidikan olah raga juga merupakan hal yang sangat baik, karena manusia yang berkualitas yang dicita-citakan adalah sehat jasmani dan rohani. Pembinaan olah raga di sekolah setiap Minggu hanya berlangsung beberapa jam saja sehingga waktu latihan sangat terbatas. Karena itu, hal tersebut harus dilengkapi oleh masyarakat. (Suryasubroto, 2001: 63)

2) Bidang pendidikan kesenian

Pengembangan bakat seni peserta didik di sekolah waktunya sangat terbatas, oleh karena itu, adanya perkumpulan kesenian di masyarakat sangat membantu proses pembinaan bakat dan jiwa seni peserta didik, misal perkumpulan seni musik, tari, drama, lukis, dan pahat (Suryasubroto, 2001: 64).

Adapun menurut Mukhtar dan Iskandar, bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Finansial. Mengenai keuangan, dalam bentuk ini masyarakat disamping sumber keuangannya berasal dari pemerintah namun lebih diharapkan adalah swadaya masyarakat itu sendiri untuk memajukan proses belajar yang dikelola, dari masyarakat untuk masyarakat sehingga tujuan masyarakat belajar dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan.
- b. Proteksi. Perlunya masyarakat belajar tidak bisa terlepas dari perlindungan baik hukum maupun proses pelaksanaannya, hasil produk juga harus bisa bersaing dan memenuhi kebutuhan yang diharapkan.
- c. Moral. Yaitu masyarakat mampu membedakan baik buruk yang diterima mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban.
- d. Akademis. Bentuk partisipasi ini bersifat ilmu pengetahuan yang dapat disumbangkan oleh masyarakat untuk pelaksanaan dari proses belajar yang diinginkan, sehingga sekolah yang diharapkan oleh masyarakat dapat bermutu.

- e. Kurikulum. Kurikulum merupakan susunan rencana pelajaran atau perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Dari kurikulum disusun dan dibuat oleh masyarakat untuk masyarakat dan sesuai dengan keinginan dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dengan kata lain didesain untuk kepentingan masyarakat.
- f. Sumber belajar, adalah orang yang dapat dijadikan tempat bertanya tentang berbagai pengetahuan, dalam ini bersumber dari masyarakat setempat di mana sekolah atau pendidikan dilaksanakan.
- g. IT (Ilmu Teknologi). Untuk memenuhi tuntutan zaman IT harus dapat menjadi partisipasi dalam membentuk masyarakat belajar, karena dengan IT akan terlihat kemampuan pelaksanaan kegiatan sekolah masyarakat, meskipun kemampuan di bidang IT belum dapat sepenuhnya dilaksanakan namun IT dapat membantu meluncurkan program kerja yang direncanakan masyarakat belajar.
- h. Kelembagaan. Manajerial, kepemimpinan yaitu bersifat lembaga yang dipimpin oleh seorang manajer dengan tugas untuk membentuk program kerja masyarakat belajar yang diinginkan (Mukhtar dan Iskandar, 2009: 204—206).

Dalam Pasal 4 peraturan pemerintah no 39 tahun 1992, sebagaimana dikutip Suryosubroto, partisipasi masyarakat dapat berbentuk:

- a. Pendirian dan penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah di semua jenjang pendidikan kecuali pendidikan kedinasan.
 - b. Pengadaan dan pemberian tenaga pendidikan
 - c. Pemberian bantuan tenaga ahli dan pengadaan dana dan pemberian bantuan berupa wakaf, hibah, pinjaman, beasiswa dan bentuk-bentuk lain yang sejenis.
 - d. Pengadaan dan penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan atau diselenggarakan pemerintah.
 - e. Pengadaan dan pemberian buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
 - f. Pemberian kesempatan untuk magang atau latihan bekerja untuk anak didik.
 - g. Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung dan tanah untuk kegiatan belajar mengajar.
 - h. Pemberian pelatihan manajemen bagi penyelenggara pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional.
 - i. Pemberian bantuan berupa pemikiran dan pertimbangan yang berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan.
 - j. Pemberian bantuan dan pelaksanaan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan.
 - k. Pemberian kesempatan untuk berperan dalam program pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah di dalam dan di luar negeri. (Suryosubroto, 2001: 84—85).
7. Dasar Hukum Partisipasi Masyarakat dalam pendidikan
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan kembali ditegaskan dalam pasal 56 ayat 1—4. Pasal 56 ayat (1) "Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang

meliputi perencanaan pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah". Pasal 56 ayat (2): "Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis". Pasal 56 ayat (3): "Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan Pendidikan". Pasal 56 ayat (4): "Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, di antaranya adalah:

- a. Pada pasal 6 disebutkan bahwa "Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan"
- b. Pada pasal 8 disebutkan bahwa "Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan".
- c. Pada pasal 9 disebutkan bahwa "Masyarakat wajib memberi dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan".

Pada pasal 6, 8 dan 9 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan. Hak masyarakat dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan di madrasah antara lain ikut berpartisipasi dalam program pendidikan di sekolah mulai dari membuat visi, misi madrasah sampai ikut menentukan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik daerah setempat; sedangkan kewajiban masyarakat antara lain memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah berupa ikut berpartisipasi memberikan sumber daya yang belum dimiliki oleh sekolah yaitu berupa ide (pemikiran), tenaga, pemberian bantuan buku, alat pendidikan dan dana masyarakat di samping mempunyai kewajiban membiayai pendidikan, mereka juga mempunyai kewajiban untuk memikirkan, memberikan masukan, dan membantu penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Kewajiban ini sangat perlu dikomunikasikan secara luas kepada masyarakat agar dapat dipahami bersama, sehingga partisipasi masyarakat dalam pendidikan menjadi semakin besar.

8. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat

Masyarakat merupakan partner sekolah dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran. Kerja sama keduanya sangat penting untuk membentuk pribadi peserta didik. Sebagai partner masyarakat, sekolah dipengaruhi oleh corak pengalaman seseorang di dalam lingkungan masyarakat, bahan bacaan, tontonan, dan kondisi sosial ekonomi. Sekolah juga harus bertanggungjawab terhadap perubahan masyarakat, yang dapat dilakukan melalui fungsi layanan bimbingan, dan forum komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Di sisi lain, kesadaran peserta didik untuk mendayagunakan masyarakat sebagai sumber belajar dipengaruhi oleh kegiatan dan pengalaman belajar

yang diikutinya di sekolah.

Dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah, kepala sekolah dan guru merupakan kunci keberhasilan, yang harus menaruh perhatian terhadap apa yang terjadi terhadap peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk:

- a. Saling membantu antara sekolah dengan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing.
- b. Saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja.
- c. Kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa bangga dan ikut bertanggungjawab atas suksesnya pendidikan di sekolah. (E. Mulyasa, 2006: 130)

Dalam konteks manajemen pendidikan berbasis masyarakat, ada beberapa cara melibatkan masyarakat baik secara aktif maupun pasif. Cara-cara yang dilakukan untuk melibatkan masyarakat antara lain:

- a. Menghimpun masyarakat yang peduli dengan pendidikan melalui komite sekolah.
- b. Memilih dan menentukan anggota komite yang memiliki pandangan yang luas tentang pendidikan.
- c. Menjadikan komite sekolah sebagai tempat masyarakat berhimpun, memberikan masukan dan bantuan baik yang bersifat materil atau apa saja yang memungkinkan semakin efektifnya manajemen sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- d. Setiap keputusan yang diambil manajemen sekolah dalam konteks pelibatan masyarakat, dilakukan secara bersama-sama dengan pengurus komite sekolah.
- e. Memberikan kesempatan kepada komite sekolah untuk mencari dana, mitra dan berbagai kepentingan sekolah. (Amirudin Siahaan, 2006: 130).

Menurut E. Mulyasa, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menggalang partisipasi masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan di sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan. Misalnya, bakti sosial, perpisahan, peringatan hari besar nasional dan keagamaan, serta pentas seni. Pelibatan masyarakat disesuaikan dengan hobi, kemampuan dan pekerjaan mereka dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan di sekolah.
- b. Mengidentifikasi tokoh masyarakat, yaitu orang-orang yang mampu mempengaruhi masyarakat pada umumnya. Tokoh tersebut yang pertama kali harus dihubungi, diajak kompromi, konsultasi, dan diminta bantuan untuk menarik masyarakat berpartisipasi dalam program dan kegiatan sekolah. Tokoh-tokoh tersebut mungkin berasal dari orang tua peserta didik, figur masyarakat (Kyai), olahragawan, seniman, informal leader, psikolog dan lain sebagainya.
- c. Melibatkan tokoh masyarakat tersebut dalam berbagai program dan kegiatan sekolah yang sesuai dengan minat mereka.

- d. Memilih waktu yang tepat untuk melibatkan masyarakat sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. (Mulyasa, 2003: 173—174).

Menurut KBBI kiai adalah sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai dalam agama Islam. Kementerian Pendidikan Nasional memberikan acuan pada lembaga pendidikan dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat, sekolah dapat:

- a. Melaksanakan program-program kemasyarakatan misalnya kebersihan lingkungan.
- b. Mengadakan *open house* yang memberi kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui program dan kegiatan sekolah. Tentu saja dalam kesempatan semacam ini sekolah perlu menonjolkan program-program yang menarik minat masyarakat.
- c. Mengadakan buletin sekolah, majalah atau lembar informasi yang secara berkala memuat kegiatan dan program sekolah, untuk diinformasikan kepada masyarakat.
- d. Mengundang tokoh untuk menjadi pembicara atau pembina sesuatu program sekolah. Misalnya mengundang dokter yang tinggal di sekitar sekolah atau orang tua murid untuk menjadi pembicara atau pembina program kesehatan sekolah.
- e. Membuat program kerja sama sekolah dengan masyarakat misalnya dalam perayaan hari nasional dan keagamaan. (Mulyasa, 2003: 174—175)

9. Pendirian Madrasah

Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (Mts), dan Madrasah Aliyah (MA)

Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

a. Persyaratan

- 1) Persyaratan administratif pendirian madrasah adalah sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan pendidikan merupakan organisasi berbadan hukum
- a) Memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/AT).
- b) Mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama
- c) Memiliki kesanggupan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan paling sedikit sampai 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya.

- 2) Persyaratan Teknis

Rincian persyaratan teknis pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Kurikulum
- b) Rencana Pengembangan
- c) Jumlah dan Prosentase Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Pendidik
- d) Sarana dan Prasarana

- 3) Persyaratan Kelayakan

- a) Tata ruang
- b) Geografis

- c) Ekologis
- d) Prospek pendaftar
- e) Sosial dan budaya
- f) Demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal
- b. Pembagian Kewenangan
Dalam rangka pemberian izin pendirian madrasah, pembagian kewenangan diatur sebagai berikut:
 - 1) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
 - a) Menetapkan kebijakan teknis terkait pemberian izin pendirian madrasah
 - b) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pemberian izin pendirian madrasah
 - 2) Kanwil Kementerian Agama Provinsi
 - a) Melakukan vertikasi lapangan dalam rangka penentuan kelayakan pendirian madrasah, apabila diperlukan.
 - b) Melaksanakan rapat pertimbangan pemberian izin pendirian madrasah
 - c) Menetapkan keputusan pemberian izin pendirian madrasah
 - d) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap madrasah setelah pemberian izin pendirian madrasah
 - e) Menetapkan keputusan penutupan madrasah melalui pencabutan izin pendirian madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 3) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
 - a) Melakukan vertikasi dokumen persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan.
 - b) Melakukan vertifikasi lapangan dalam rangka penentuan kelayakan pendirian madrasah
 - c) Memberikan rekomendasi pemberian izin pendirian madrasah
 - d) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan madrasah setelah pemberian izin madrasah
 - e) Memberikan pertimbangan/rekomendasi peninjauan ulang izin pendirian madrasah atau penutupan madrasah berdasarkan hasil evaluasi perkembangan madrasah dan/atau hasil akreditasi madrasah setelah 4 (empat) tahun bagi RA, MTs, MA, dan MAK atau 7 (tujuh) tahun bagi MI terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah pemberian izin operasional.
- c. Prosedur Pendirian Madrasah
 - 1) Organisasi berbadan hukum mengajukan proposal pendirian madrasah dengan melampirkan persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan.
 - 2) Proposal disampaikan kepada Kepala Kantor wilayah kementerian agama setempat.
 - 3) Kepala kantor kementerian agama menugaskan kepala seksi pendidikan madrasah untuk membentuk tim vertifikasi paling sedikit 3 (tiga) orang yang beranggotakan dari unsur seksi pendidikan madrasah dan pengawas madrasah
 - 4) Tim vertifikasi melakukan vertifikasi dokumen proposal pendirian madrasah berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan
 - 5) Apabila hasil vertifikasi dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka tim vertifikasi melakukan vertikasi lapangan, namun apabila

- belum terpenuhi persyaratannya maka kepala kementerian agama segera memberitahukan kepada organisasi calon penyelenggara.
- 6) Apabila hasil vertifikasi lapangan sudah memenuhi persyaratan maka kepala kantor kementerian agama memberikan rekomendasi pendirian madrasah kepada kepala kantor wilayah kementerian agama. Apabila belum akan diberitahukan kepada calon penyelenggara.
 - 7) Berdasarkan rekomendasi dari kepala kantor kementerian agama, kepala kantor wilayah kementerian agama menugaskan kepala bidang pendidikan madrasah untuk mengadakan rapat pertimbangan pemberian izin pendirian madrasah yang melibatkan tim vertifikasi lapangan dan para kepala seksi di lingkungan kantor wilayah kementerian agama.
 - 8) Kepala bidang pendidikan madrasah dapat melakukan vertifikasi lapangan ulang untuk menentukan kelayakan pendirian madrasah, apabila diperlukan
 - 9) Kepala bidang madrasah melaporkan hasil keputusan rapat pertimbangan pemberian izin pendirian madrasah kepada kepala kantor wilayah kementerian agama.
 - 10) Apabila kelengkapan persyaratan madrasah terpenuhi berdasarkan hasil keputusan rapat pertimbangan pemberian izin pendirian madrasah, kepala kantor wilayah atas nama menteri agama menetapkan keputusan pemberian izin operasional pendirian madrasah dan piagam pendirian madrasah.
 - 11) Apabila kelengkapan persyaratan belum terpenuhi berdasarkan hasil rapat pertimbangan penetapan izin pendirian madrasah, kepala bidang pendidikan madrasah akan memberitahukan hasilnya kepada organisasi calon penyelenggara.

Kepala bidang pendidikan madrasah menyampaikan asli keputusan menteri agama tersebut dan asli piagam pendirian madrasah kepada organisasi calon penyelenggara dengan menyampaikan fotokopi salinan keputusan tersebut kepada kepala Kantor kementerian agama setempat dan direktur jenderal pendidikan Islam.

Kerangka Berpikir

**PENCAPAIAN TUJUAN
PENDIDIKAN NASIONAL**

**PENGEMBANGAN MI
AR-RAHMAN
WIDODAREN**

Gambar 1 Kerangka Berfikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam mendirikan MI Ar-Rahman Widodaren yang berfokus kepada bentuk-bentuk partisipasinya dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah Kemenag. Berdasarkan tujuan tersebut maka penelitian ini dilakukan melalui pengamatan yang intensif dan situasi yang wajar (natural setting). Pendekatan seperti ini dikenal dengan pendekatan kualitatif. (Sugiyono, 2016: 14)

Penelitian ini dirancang dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan melalui pengamatan langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian. Penulis langsung mengadakan pengamatan di MI Ar-Rahman Widodaren untuk mengetahui kondisi madrasah dan berinteraksi dengan pihak madrasah untuk mendapatkan data dan minta dokumentasinya.

Lokasi penelitian ini adalah :

1. Desa Widodaren RT 004 dan RT 005 RW 002 Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur.
2. MI Ar-Rahman Widodare: Dusun Widodaren Kidul RT. 005 RW. 002, Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur.

Populasi adalah keseluruhan orang yang menjadi sasaran penelitian. Dari keseluruhan populasi ini yang tentunya sangat banyak dan luas, maka dibatasi atau diambil sebagian saja dari populasi tersebut, yang dikenal dengan populasi target. Populasi target ini dikelompokkan dan dianggap dapat mewakili karakter populasi secara keseluruhan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah warga masyarakat desa Widodaren RW 002 yang telah dewasa

Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang dianggap bisa mewakili populasi. Dalam penelitian ini sampel sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, yang terdiri dari staf Kemenag, pengurus yayasan, pihak madrasah, warga dan tokoh masyarakat serta orang tua siswa. Sampel diambil secara Sampling Purpose yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2016: 124).

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini yaitu mulai dari penyusunan data/informasi yang relevan yang akan dikumpulkan dan selanjutnya dicatat sebagai panduan sebagai pencatat hasil dan observasi, wawancara, dan termasuk catatan dan lampiran-lampiran mengenai partisipasi masyarakat dalam mendirikan MI Ar-Rahman Widodaren.

Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan teori analisis data Miles dan Huberman, menurutnya analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara

bersama-sama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan/verifikasi data (Sugiyono, 2016: 337).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Mendirikan suatu lembaga pendidikan atau madrasah tidak lepas dari peran semua pihak yang bisa mendukung untuk kemajuan madrasah itu, diharapkan semua pihak terutama masyarakat harus selalu meningkatkan partisipasinya agar sekolah bisa berkembang pesat dan mempunyai fasilitas yang memadai sehingga visi, misi dan tujuan dari madrasah tersebut akan cepat tercapai. Seperti penelitian yang telah penulis laksanakan di MI Ar-Rahman di desa Widodaren kecamatan Widodaren kabupaten Ngawi ini. Dari hasil observasi dan wawancara penulis terdapat beberapa temuan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam mendirikan MI Ar-Rahman Widodaren diantaranya adalah:

a. Partisipasi dalam bentuk non fisik

Masyarakat Widodaren pertama kali adanya partisipasi pada waktu diadakan rapat oleh seluruh warga desa Widodaren tentang pengambilan keputusan mengenai madrasah apa yang harus dibangun untuk kegiatan penggunaan gedung MDTA di pagi harinya. Kesepakatan yang diperoleh dari seluruh warga masyarakat Widodaren adalah mendirikan madrasah ibtidaiyah.. Partisipasi non fisik lainnya yang dilakukan oleh masyarakat Widodaren yaitu dengan menghadiri rapat RT setiap tiga bulan sekali yang dihadiri juga oleh pengurus yayasan Ar-Rahman. Ide yang datang dari tokoh masyarakat diantaranya adalah tentang gotong royong kepada semua guru PAI kecamatan Widodaren dalam pengadaan bangku serta ide yang merencanakan pengadaan fasilitas kesenian drum band serta program tahfidz untuk menarik minat siswa baru.

Sedangkan partisipasi non fisik yang berupa ide atau sumbangan pikiran dari warga masyarakat belum ada, dikarenakan warga masyarakat yang mayoritas penduduknya petani itu merasa pendidikannya rendah sehingga hanya menjadi pengikut saja apabila ada program-program yang diadakan oleh yayasan berkaitan dengan pendirian MI Ar-Rahman Widodaren. Jadi ide atau pendapat hanya diperoleh dari tokoh masyarakat, pihak madrasah dan pengurus yayasan saja.

b. Partisipasi dalam bentuk fisik

Partisipasi dari masyarakat Widodaren dalam bentuk fisik diantaranya berupa uang seperti yang dijelaskan oleh ketua yayasan Ar-Rahman awalnya iuran warga setiap ada rapat RT tetapi bersifat sukarela dan tidak ditentukan nilainya. Selain itu juga dalam bentuk material seperti semen dan lain-lain. Bagi warga masyarakat yang memiliki pohon Jati juga ikut menyumbangkan kayu Jatinya. Ditambah juga ada donatur tetap yang setiap bulannya memberi donasi seperti yang dipaparkan oleh pengurus yayasan bagian hubungan masyarakat.

Pada saat pembangunan MI warga masyarakat secara bergantian menjadi tenaga bangunan, sedangkan untuk ibu-ibunya juga secara bergiliran memberikan konsumsi.

Partisipasi untuk sarana madrasah yaitu berupa pembelian bangku dari hasil gotong royong semua guru PAI di SD kecamatan Widodaren. Dan untuk fasilitas lainnya dari tokoh masyarakat memberikan fasilitas antar jemput siswa menggunakan mobil pribadinya. Partisipasi dalam bentuk fisik dari orang tua siswa yaitu adanya program infak setiap hari jumlah melalui siswa yang disetorkan kepada guru kelas masing-masing.

2. Tentang kebijakan dari pemerintah Kemenag dalam mendirikan MI Ar-Rahman Widodaren

a. Tahap perencanaan

Kebijakan dari pemerintah Kemenag terhadap MI Ar-Rahman semenjak diturunkannya surat izin pendirian dan surat izin operasional maka MI Ar-Rahman Widodaren dalam naungan Kemenag. Pemerintah Kemenag dengan memberi tugas stafnya sebagai pengawas di MI Ar-Rahman Widodaren. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan madrasah akan terus dipantau oleh Kemenag.

b. Tahap Pelaksanaan

Pemerintah Kemenag sudah memberikan bantuan berupa dana BOS dan tenaga pendidik dari guru negeri. Akan tetapi pemerintah Kemenag tidak bisa memberikan bantuan sepenuhnya dikarenakan MI Ar-Rahman Widodaren adalah madrasah swasta yang dikelola oleh yayasan sehingga untuk kemajuan madrasah diprioritaskan kepada yayasan dengan melibatkan pihak madrasah, beda dengan madrasah negeri, semua bantuan sepenuhnya didapat dari Kemenag.

c. Tahap Evaluasi

Staf Kemenag yang bertugas sebagai pengawas mengadakan evaluasi dengan berkomunikasi kepada kelompok guru yang dinamakan PKG (Pusat Kerja Guru) untuk mengevaluasi perkembangan dari MI Ar-Rahman Widodaren. Walaupun dalam evaluasi tersebut pengawas dari Kemenag mengalami kendala diantaranya kondisi tenaga pendidik di MI Ar-Rahman tidak bisa bertahan lama dikarenakan pengangkatan guru negeri dan SK (Surat Keputusan) ditempatkan di sekolah lain.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan penelitian diatas, diperoleh bahwa:

a. Bentuk partisipasi masyarakat dalam mendirikan MI Ar-Rahman Widodaren. Dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

1) Partisipasi dalam bentuk non Fisik

Semua warga masyarakat Widodaren ikut menghadiri rapat dalam rangka pengambilan keputusan pada saat akan mendirikan MI Ar-Rahman Widodaren. Hal ini sesuai dengan pendapat Isbandi (2007: 27) keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Semua pihak berusaha untuk bersama-sama meningkatkan partisipasinya demi kemajuan MI Ar-Rahman dalam bentuk ide dan pemikiran, salah satunya ide dari Bapak Drs, Achmad Fuad, M.Ag, staf dari Kemenag walaupun beliau sudah tidak bertugas sebagai pengawas di MI Ar-Rahman Widodaren tetapi tetap terus ikut serta berpartisipasi karena beliau sendiri juga warga desa Widodaren. Ide beliau yaitu untuk guru-guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) seluruh kecamatan Widodaren diwajibkan untuk bergotong royong dalam pengadaan bangku yang disumbangkan ke MI Ar-Rahman Widodaren

pada saat dana sertifikasi turun.

Partisipasi dalam bentuk ide dan pemikiran datang dari tokoh masyarakat, pengurus yayasan dan staf Kemenag. Partisipasi pada tahap pelaksanaan dalam bentuk non fisik dari pihak madrasah dan pihak yayasan adalah pengadaan program penggalangan dana untuk membangun MI Ar-Rahman Widodaren, seperti dari pihak yayasan adanya sumbangan sukarela setiap ada acara rapat RT dan dari pihak madrasah adanya program infak siswa MI Ar-Rahman setiap hari Jum'at. Sesuai dengan pendapat Mubyarto (1997: 35) membantu keberhasilan program juga termasuk definisi dari partisipasi. Bagaimana dengan sumbangan pikiran/ide serta evaluasi yang datangnya dari masyarakat atau orang tua siswa MI Ar-Rahman Widodaren sendiri.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan, partisipasi masyarakat dalam bentuk non fisik yaitu sumbangan pikiran dan ide hanya dilaksanakan oleh pengurus yayasan, staf Kemenag, pihak sekolah dan tokoh masyarakat saja, untuk masyarakat lainnya dan orang tua murid hanya ikut mendukung saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2006: 167) partisipasi dapat berupa dukungan dalam pelaksanaan pendidikan.

2) Partisipasi dalam bentuk fisik

Partisipasi dalam bentuk fisik yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat Widodaren, untuk partisipasi tahap perencanaan semua masyarakat sudah ikut serta, terbukti dengan adanya rapat untuk semua warga tentang mencari kesepakatan untuk mendirikan MI Ar-Rahman Widodaren. Pada tahap pelaksanaan bentuk partisipasi yang telah dilakukan oleh masyarakat Widodaren yaitu selain berupa uang ada yang berbentuk material seperti semen dan segala macamnya yang dibutuhkan dalam pembangunan MI Ar-Rahman Widodaren. Bahkan warga yang mempunyai pohon Jati juga ikut menyumbang kayu Jati. Partisipasi ini sesuai dengan pendapat koentjaraningrat (1986: 174) bahwa partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai sumbangan tenaga, uang, atau barang dalam rangka menyukseskan program atau proyek pembangunan. Sedangkan upaya dari pihak madrasah untuk menggalang partisipasi masyarakat terutama orang tua, dari hasil penelitian ini dengan diadakannya program infak setiap hari jumat lewat siswa MI Ar-Rahman Widodaren yang disetorkan kepada guru kelas masing-masing. Selain itu partisipasi yang berbentuk fisik lainnya adalah fasilitas mobil antar jemput, Bapak Beni Ismanto selaku ketua RW 002 Widodaren yang setiap hari dengan ikhlas mengantar dan menjemput siswa MI Ar-Rahman Widodaren ke tempat pembelajaran menggunakan mobil pribadinya yaitu mobil carry tahun 1988 yang jok mobil tengah ditambah dengan kursi kayu panjang agar bisa muat banyak penumpang.

Partisipasi dalam penyediaan fasilitas tersebut di atas sesuai dengan pendapat Wahjosumijo (2010: 335) bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan salah satunya membentuk fasilitas-fasilitas belajar guna melancarkan proses kegiatan belajar di Sekolah. Maka dapat ditarik simpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk non fisik masih belum banyak untuk memenuhi fasilitas di MI Ar-Rahman Widodaren, menurut penulis ada yang lebih penting juga barang-barang yang

dibutuhkan oleh siswa di madrasah yaitu buku-buku di ruang perpustakaan. Dari hasil observasi penulis di ruang perpustakaan tidak ada buku cerita yang sangat dibutuhkan siswa untuk menambah pengetahuannya pada saat di luar jam pelajaran. Hal ini penulis sampaikan kepada kepala MI Ar-Rahman Widodaren. Jadi menurut penuturan orang tua siswa tersebut di atas intinya sangat setuju apabila setiap tahun ajaran baru ada program setiap siswa membawa dua buah buku cerita untuk melengkapi perpustakaan. Beliau sangat setuju pokoknya kalau ada program untuk kemajuan sekolah. Di bawah ini juga hasil wawancara penulis dengan warga masyarakat Widodaren dan sebagai pengurus yayasan Ar-Rahman Widodaren di seksi pendidikan.

Dari hasil wawancara dapat ditarik simpulan bahwa dengan partisipasi dalam bentuk fisik yang berupa buku untuk melengkapi perpustakaan sangat diterima dan disetujui oleh semua pihak. Semua ikut mendukungnya agar madrasah bertambah meningkat fasilitasnya.

Sedangkan kendala dari beberapa warga yang belum ikut berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan untuk mendirikan MI Ar-Rahman Widodaren faktornya hanya dari segi ekonomi saja. Dan mengenai partisipasi masyarakat untuk biaya operasional MI Ar-rahman juga masih terlalu minim, sebetulnya dari pihak orang tua siswa ada keinginan untuk membantu, karena mereka faham bahwa sekolah masih membutuhkan biaya operasional yang banyak, hal tersebut dijelaskan waktu rapat wali murid, tapi lembaga belum berani mungut dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) karena sekolah masih mencari murid, padahal sebetulnya orang tua murid sangat setuju apabila dipungut SPP.

Menurut penulis simpulkan bahwa partisipasi yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat lebih banyak untuk pembangunan gedung saja sedangkan partisipasi untuk biaya operasional sekolah masih banyak yang dibutuhkan.

b. Kebijakan pemerintah dalam mendirikan MI Ar-Rahman Widodaren

Dalam mendirikan MI Ar-Rahman ini banyak kebijakan dari pemerintah khususnya kementrian agama, karena setelah diturunkan surat izin operasional maka madrasah dibawah naungan Kemenag, kebijakan dan bantuannya seperti yang telah dijelaskan oleh staf Kemenag bagian pengawas madrasah di kecamatan Widodaren yang bertugas di MI Ar-Rahman dari berdirinya tahun 2012 hingga tahun 2016. Jadi bantuan dari pemerintah yang berupa buku-buku dan alat tulis belum ada. Partisipasi dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pemerintah sudah memberikan kebijakannya dalam usaha memajukan MI Ar-Rahman.

Mengenai kebijakan-kebijakan dari pemerintah penulis juga mengadakan wawancara kepada Bapak Syaifudin, M.Ag, beliau juga staf dari Kemenag yang bertugas menjadi pengawas madrasah di wilayah kecamatan Widodaren termasuk MI Ar-Rahman Widodaren setelah Bapak Drs. Achmad Fuad, M.Ag. Bapak Syaifudin, M.Ag ini bertugas pada periode tahun 2016. Pemerintah sangat mendukung dengan adanya partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh warga sekitar MI Ar-Rahman Widodaren, harapan kedepannya yang diinginkan oleh pemerintah. Kemenag telah memberikan kebijakan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk perbantuan kepada MI swasta yaitu dengan adanya dana BOS dan tenaga pendidik dari guru negeri.

Partisipasi itu tidak cukup pada tahap perncanaan dan pelaksanaan saja tetapi

harus ada tahap evaluasi agar bisa diketahui perkembangan hasil partisipasi tersebut. Dalam pelaksanaan evaluasi, staf pemerintahan Kemenag terdapat kendala, yang dapat disimpulkan, pemerintah Kemenag sudah ikut serta dalam tahap pelaksanaan terbuktinya dengan adanya bantuan secara fisik dan non fisik yang berkaitan dengan kemajuan madrasah walaupun tidak sepenuhnya dengan alasan MI Ar-Rahman Widodaren tergolong madrasah swasta dalam prioritas lembaga. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Amirudin Siahaan (2006: 130) memberikan kesempatan komite atau lembaga untuk mencari mitra dan dana untuk kepentingan madrasah. Dan adanya staf Kemenag yang bertugas sebagai pengawas di MI Ar-Rahman Widodaren berarti pemerintah Kemenag ikut mengevaluasi perkembangan MI Ar-Rahman Widodaren.

Dengan berbagai tahap di atas bisa penulis simpulkan bahwa dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Kemenag bisa dikatakan sebagai partisipasi total. Yang sesuai dengan pendapat Ericson dalam Slamet (1993) Partisipasi terbagi dalam tiga tahap. Yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sedangkan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar MI Ar-Rahman Widodaren hanya ada 11 (sebelas) orang yang menjadi partisipan tetap dari 4.470 jumlah penduduk dewasa di desa Widodaren. Lainnya bisa dikatakan ikut partisipasi tahap perencanaan saja karena ada faktor kendala kondisi ekonomi, dan ada juga yang dari tahap perencanaan sampai ke tahap pelaksanaan saja dengan alasan masyarakat desa dengan kondisi pendidikan yang rendah hanya mengikuti saja dengan perkembangan dari MI Ar-Rahman Widodaren tersebut. Simpulan yang bisa diambil bahwa masyarakat Widodaren belum banyak yang melaksanakan partisipasi secara total kecuali yang ikut berkecimpung dalam kepengurusan yayasan, tokoh masyarakat dan pihak sekolah. Yang lainnya hanya melaksanakan partisipasi secara parsial saja.

Selanjutnya mengenai kondisi MI Ar-Rahman sebelum dan sesudah adanya partisipasi masyarakat. Banyak perubahan dan peningkatan dalam kemajuan pada MI Ar-Rahman Widodaren setelah adanya partisipasi masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat sangat penting dalam kemajuan madrasah sesuai dengan pendapat Alastraire White dalam Sastropoetro (1988), ada 10 alasan pentingnya partisipasi masyarakat diantaranya menghimpun berbagai pengetahuan yang didapat di masyarakat dan lebih banyak hasil kerja yang dicapai. Dalam upaya peningkatan partisipasi di desa Widodaren masih banyak yang belum dilakukan oleh pihak yayasan dan madrasah seperti mengadakan program-program madrasah yang melibatkan masyarakat sekitar MI Ar-Rahman Widodaren.

Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat desa Widodaren kecamatan Widodaren kabupaten Ngawi adalah bentuk partisipasi yang sesuai dengan pendapat Ericson dalam Slamet (1993) bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdapat tiga tahap: Yang pertama, tahap perencanaan yaitu berupa usulan, saran dan kritik pada suatu rapat, Yang kedua, tahap pelaksanaan yaitu dengan memberikan tenaga, dana/uang, barang/material. Yang ketiga, dalam tahap pemanfaatan yaitu partisipasi masyarakat yang berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan atau memelihara proyek yang dibangun.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam mendirikan/mengembangkan MI Ar-Rahman di desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi di antaranya:
 - a. Dalam bentuk fisik yaitu tanah wakaf seluas 925m² dari warga; uang yang diperoleh dari iuran sukarela perbulan berdasarkan kesepakatan dalam rapat RT; serta donasi dari para donatur rutin setiap bulan; infak dari siswa MI Ar-Rahman setiap hari Jum'at; material untuk membangun gedung; semen; material; kayu jati; tenaga bangunan; konsumsi pekerja tukang; bangku; dan fasilitas mobil antar jemput; dan buku perpustakaan sekolah;
 - b. Dalam bentuk non fisik yaitu ide atau sumbangan pikiran dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh non formal lainnya yang akan direalisasikan pada tahun-tahun mendatang, seperti program tahfidz Qur'an.
2. Kebijakan pemerintah dalam mendirikan/mengembangkan MI Ar-Rahman Widodaren berupa bantuan administratif dan non administratif; adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengembangan MI Ar-Rahman Widodaren, serta bantuan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan tenaga guru negeri.

Saran

1. Kepada pihak yayasan/pihak madrasah serta masyarakat (pemangku kepentingan) seyogyanya untuk melanjutkan kerja sama yang telah diwujudkan dengan baik selama ini;
2. Program pendukung yang perlu dikembangkan misalnya; peningkatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) bekerjasama dengan instansi kesehatan terdekat; peningkatan kerjasama dengan instansi pertanian dalam rangka penanaman sebagai apotek hidup, dan peningkatan kerjasama dengan instansi lain yang terkait.
3. Melanjutkan pemupukan hubungan kerjasama yang baik dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh Perempuan, dan tokoh-tokoh penting lainnya.
4. Kepada pemerintah agar terus meningkatkan pembinaan baik administratif maupun non administratif, khususnya subsidi, dana BOS, tenaga guru dan sarana-sarana lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku

- [1] Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- [2] Irene, Siti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- [3] Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [4] Minarti, Sri. 2011. *Manajemen Sekolah Mengelola Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- [5] Mulyasa, E. 2003. *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*. Bandung: Departemen Pendidikan Agama RI

-
- [6] _____. 2006. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: Remaja Rodakarya
 - [7] _____. 2011. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara
 - [8] Mukhtar dan Iskandar. 2009. *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Gaung Persada Press
 - [9] Miarso, Yusufhadi. 2004. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana
 - [10] Pidarta, Made. 1998. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi aksara
 - [11] Siahaan, Amirudin dkk. 2006. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Jakarta: Quantum Teaching.
 - [12] Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
 - [13] Suprayogo, Imam. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya
 - [14] Suryobroto, B. 2001. *Humas Dalam Dunia Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya.
 - [15] Suprayogo, Imam. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Ramaja Rosdakarya.
 - [16] Tilaar, HAR. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesi: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya
 - [17] _____. 2009. *Paradigma Baru Pendidikn Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
 - [18] Wahjosumijdo. 2010. *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta: Raja Gravindo Persada
 - [19] Departemen Agama RI, 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara

Sumber Internet

- KBBOnline.2019.ArtiPartisipasi. <https://kbbi.web.id/partisipasi> [10 April 2019 12.30 WIB]
- Hadist ajakan tentang kebaikan. <http://anshar-mtk.blogspot.com/2013/05/hadst-tentang-ajakan-kepada-kebaikan.html?m=1> {16 Agustus 2019}
- KBBOnline.2019. arti kiai <https://kbbi.web.id/kiai> {11 September 2019 17.40 WIB}

Sumber Skripsi dan Tesis

- Fathul Maujud. 2017. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Islahul Muta'Alim Pagutan Kota Mataram). [Skripsi] Mataram. Fakultas Tarbiyah. UIN
- Kurniasih. 2018. Efektifitas penggunaan Poster Terhadap Peningkatan Ketrampilan Menulis Siswa Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darussalam Sukaslamet Indramayu. [Skripsi] Indramayu. Fakultas Tarbiyah IAI AL-AZIS
- Miftahul Hidayah, 2011. Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah Tenggor Rejotangan Tulungagung. [Skripsi] Tulungagung IAIN: Tulungagung.
- Siti Samroh. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas. [Tesis] Purwokerto: Program Sarjana. IAIN
- Umar. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam di MI Miftahul Falah Batur 01, Batur Wetan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang Tahun

2016 [Skripsi] Salatiga: Fakultas Tarbiyah. IAIN

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab XV Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1-4)

Direktorat Jenderal Pengembangan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri (2006) yang menjadi bentuk partisipasi yang diperinci dalam jenis-jenis partisipasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No 28/1990 Pasal 1 Ayat 2

Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1385 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh lembaga atau perorangan*

Sumber Jurnal

Hj Sada. 2017. *Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Islam*. J Pendidikan Islam. 8: 1

Lutfi Widad. 2017. *Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan studi Kasus MI Ma'Arif Banyumas*. J Partisipasi Masyarakat. 5:2

2072

JOEL

Journal of Educational and Language Research

Vol.1, No.12, Juli 2022

ISSN: 2807-8721 (Cetak)

ISSN: 2807-937X (Online)

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN